

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi, disimpulkan Berdasarkan pembahasan masing-masing kriteria evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn:

1. Efektivitas

Kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Meskipun bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, kurangnya sosialisasi, ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi, serta pengawasan yang lemah telah menghambat pencapaian tujuan tersebut. Agar kebijakan ini efektif, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan pengawasan, serta kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan.

2. Efisiensi

Dalam hal efisiensi, penggunaan sumber daya untuk program pelatihan masih belum maksimal. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam program yang disediakan menunjukkan bahwa informasi yang disebarluaskan tidak menjangkau target yang tepat. Keterbatasan dalam kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan juga menjadi penghalang. Untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, perlu ada perbaikan dalam strategi komunikasi dan penyebaran informasi mengenai program pelatihan yang ada.

3. Kecukupan

Kecukupan kebijakan ini belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal, terutama di tengah tingginya tingkat pengangguran. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur penyerapan tenaga kerja lokal, implementasi di lapangan masih

lemah dan kurang mendukung. Upaya untuk menyediakan informasi pelatihan yang relevan dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal sangat dibutuhkan untuk memperbaiki situasi ini.

4. Perataan

Dari segi perataan, masih terdapat ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kerja, terutama karena banyak perusahaan tidak mengikuti regulasi yang ada. Kesulitan dalam memastikan penyerapan tenaga kerja lokal secara langsung dan adanya persyaratan yang tinggi dalam rekrutmen menjadi tantangan utama. Untuk mencapai perataan kesempatan kerja yang lebih adil, perlu ada regulasi yang lebih jelas dan praktik rekrutmen yang lebih transparan.

5. Responsivitas

Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat belum optimal. Masyarakat kesulitan untuk memberikan masukan dan keluhan, sementara mekanisme pengaduan yang ada belum efektif. Meskipun ada niat dari pemerintah untuk mendengar masukan, implementasi nyata masih kurang. Diperlukan saluran komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar umpan balik dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam pencapaian tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya, dengan ketidaksesuaian antara sasaran yang ditetapkan dan realitas di lapangan. Meskipun kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan akses kerja, tantangan dalam implementasi, kurangnya sosialisasi, dan pedoman yang jelas untuk perusahaan membuat kebijakan ini belum berjalan efektif. Penyesuaian terhadap sasaran dan penguatan pelaksanaan kebijakan di lapangan sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun ada potensi signifikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi, kendala yang teridentifikasi perlu segera diatasi agar kebijakan perluasan kesempatan kerja dapat berjalan efektif. Membangun kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta merupakan

langkah krusial untuk menciptakan sinergi dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Peningkatan komunikasi dengan masyarakat juga penting untuk memastikan informasi mengenai kebijakan tersampaikan dengan jelas, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan kesadaran tentang program yang ada. Dengan mengatasi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan minimnya pengawasan, serta mengakomodasi umpan balik masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan lebih banyak peluang kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja lokal.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari data dan informasi yang terkumpul mengenai kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa saran penting yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari kebijakan ini:

1. Perluasan sosialisasi dan komunikasi mengenai kebijakan Peraturan Bupati No.9 Tahun 2019 harus ditingkatkan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami keberadaan dan isi dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang program sosialisasi yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, radio lokal, dan pertemuan komunitas, untuk memastikan bahwa informasi mengenai peluang kerja dan kebijakan yang ada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada dan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah perlu membentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi berkala terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan.

3. Peningkatan kualitas pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri juga perlu diperhatikan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan harus lebih terfokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini. Dalam hal ini, kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan yang relevan dapat membantu memastikan bahwa tenaga kerja lokal siap bersaing.
4. Pemerintah juga harus mempertimbangkan penetapan regulasi yang jelas mengenai persentase tenaga kerja lokal yang harus diterima oleh perusahaan. Ketentuan ini akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Regulasi yang jelas juga akan mendorong perusahaan untuk mematuhi dan berkomitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal.
5. Penyediaan platform pengaduan yang efektif harus diperkuat. Masyarakat perlu memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dan umpan balik diberikan, sehingga masyarakat merasa didengar dan berpartisipasi dalam proses evaluasi kebijakan. Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat lokal, serta mengurangi tingkat pengangguran dengan lebih efektif.

REFERENSI

BUKU

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori & Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Budi, W. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* (Second Edi). Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.
- Congge, D. U. (2017). *Patologi Administrasi Negara* (2nd ed.).
- Creswell, J. W. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication Asia Pasific.
- Dadang Solihin. (2020). *Administrasi Pembangunan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- DRS. AG Subarsono, M.Si., M. (n.d.). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Gadjah Mada Universtiy Press (ed.)). Yogyakarta: Gadjah Mada Universtiy Press.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penlitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok; PT RajaGrafindo Indonesia.
- Lanny Ramli. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Mifta, T. (2005). *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho Riant. (2009). *Public Policy* (P. E. M. Komputindo (ed.); 1st ed.). Jakarta: PT.Gramedia.

- P.Siagian, D. S. (2000). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)* (Teruna Grafica (ed.); 12th ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV.EurekaMediaAksara,9.
<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/366050-administrasi-publik-d2451b92.pdf>
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik* (1st ed.). Bandung: CV ALFABETA.
- Prijono Tjiptoherijanto, M. M. (2017). *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Said, A. Z. (2017). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Siswanto Sastrohadiwiryono, A. H. (2019). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* (Dessy Marliani Listianingsih (ed.); Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sofyan, M. (2021). *Pengembangan Sektor Unggul Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah*. Magetan: CV.ODIS.
- Stadtländer, C. T. K.-H. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485.
<https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Thoha, M. (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Kharisma Putra Utama (ed.); 3rd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, S. A. (2011). *Evaluasi Kritis: Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial* (Universitas Brawijaya Press (ed.)). Malang: Universitas Brawijaya Press.

JURNAL

- Dewata, Y. J., & Santoso, I. B. (2022). Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Wabah Virus Korona Di Kabupaten Bekasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Legal Spirit*, 6(2), 191.
<https://doi.org/10.31328/ls.v6i2.4057>
- Ervanto, R. A., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi. *Medium*, 10(1), 338–355.
[https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(1\).10088](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(1).10088)
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji RUBber Indonesia Kabupaten Bekasi). *DIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Studi Media*, 7(1), 123–133.
- Muhyiddin, M., Trisnantari, S. A., Amrizal, M. D. R., Fauwziyah, F., Harsiwie, R. I. P., & Ardhana, N. R. (2024). Indonesia Employment in 2023: Labor Force Conditions and Policy Developments in the Early Stages of the Demographic Bonus. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(1), 1–16.
<https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i1.339>
- Nurhapsari, N. F., Santoso, I. B., Hukum, F., & Singaperbangsa, U. (2021). Menanggulangi Pengangguran Yang Meningkat Akibat Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Justitia*, 8(6), 1–12.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4908>
- Putri, D. A. (2017). Upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Hukum*, 238–334.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/viewFile/9405/9059>

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2)

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan kesempatan kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi terkait No.4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Bupati Bekasi No 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor.8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

Peraturan Bupati Bekasi Nomor. 84 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan. Secara struktural, Dinas Ketenagakerjaan

WEBSITE BERITA

Mohammad Arfan Fauzi. (n.d.). *Calo Kerja, Sisi Gelap di Balik Gemerlapnya Cikarang Kota Industri*. <https://mojok.co/terminal/cikarang-kota-industri-yang-dipenuhi-calo-kerja/>, diakses: 28 Agustus 2024

Newsroom Diskominfosantik. (n.d.). *Pemkab Bekasi Komitmen Tenaga Kerja Lokal Menjadi Prioritas di Perusahaan*. BekasiKab Go.Id. <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-komitmen-tenaga-kerja-lokal-menjadi-prioritas-di-perusahaan>, diakses: 28 Agustus 2024

Syah, P. K. (2023). *Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi Jawa Barat turun*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3833190/angka-pengangguran-terbuka-di-kabupaten-bekasi-jawa-barat-turun>, diakses: 31 Agustus 2024